

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akhdhiat, Hendra. *Psikologi Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011)
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Arief, Muladi dan Barda Nawawi. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 1992)
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Aditya Bakti, 2002)
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014)
- Mamudji, S. S dan S. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009)
- Muladi, Barda Nawawi Arief. *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986)
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995)
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010)
- Reksodiputro, Marjono. *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborators) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2012)
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Siburian, Kasman dan Victorianus R. Puang. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Capiya Publishing, 2017)
- Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Ciputat: Ciputat Press, 2002).

Toha, Suherman Toha. *Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat*, (Jakarta: Pembinaa Hukum Nasional, 2011)

Toha, Suherman Toha. *Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat*, (Jakarta: Pembinaa Hukum Nasional, 2011)

B. Jurnal

Akhdiat, H. (n.d.). *Psikologi Hukum*. Pustaka Setia.

Ali, Achmad. "Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang". Vol. 1 Tahun 2012 Baby Lobster." *Journal Of Criminal*, Vol. 1 No. 3 Tahun 2020

Bilher, Hutahaeen. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak." *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2013

Bonato, Decio Franco David dan Gilson. "Early implementation of the penalty: between the guarantee of the state of innocence, res judicata and the absolute theories of the penalty", *Revista Brasileira De Direito Processual Penal*, Vol. 4 Tahun 2018

Et al, N. Ismail. "The dynamics of government policy in handling Corona Virus Disease". Vol. 4 Tahun 2020

F. Sumitro. (n.d.). "Anak di Bawah 12 Tahun Dilarang Naik Pesawat." *Majalah Popomama.Com*. <https://t.ly/9Mtcf>

Fadil, H. "Ovelina Pratiwi yang Bantu Rachel Vennya Kabur Karantina Staf di DPR RI." *Psikologi Hukum Majalah Detik News*.

H, Juwono. "Penegakan Hukum Dalam Kajian Law And Development : Problem Dan Fundamen Bagi Solusi Di Indonesia" *Indonesian Journal of International*,. Vol. 2 Tahun 2006.

H, Nurbaiti Syarif, S. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan". Vol 2 Tahun

2021

Hutahaean, Bilher. “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak.”

Jurnal Yudisial, Vol. 6 No. 1 Tahun 2013

Veronica, Ayu dan Kabib Nawawi, E. (2020). “Penegakan Hukum Pidana

Terhadap Penyelundupan Baby Lobster.” *Journal Of Criminal*, Vol. 1

No. 3

W. Sinha, M. dan Parmet. (2020). “The Law and Limits of Quarantine”. *The New*

England Journal of Medicine, Vol. 382 Tahun 2020

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan*

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236),

Pasal 1 ayat (11).

Indonesia, *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan*

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236),

Pasal 93.

Indonesia, *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan*

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), Pasal 5

Ayat (1) dan (2).

Indonesia, *Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan*

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), Pasal 1

Ayat (1), (2), dan (3).

Indonesia, *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan*

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236), Pasal 55-59.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), Pasal 1 Angka 2.*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), Pasal 5 Ayat (1).*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236), Pasal 9 Ayat (1).*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236), Pasal 93.*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236), Pasal 9 Ayat (1) dan (2).*

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 21/Pid.S/2021/PN Tng

E. Wawancara

Peneliti, Wawancara, dengan Joseph Christian, Jaksa pada Kejaksaan Negeri

Jakarta Barat (Jakarta: Universitas Tarumanagara, 21 Agustus 2023)

Peneliti, Wawancara, dengan Norbert Tanto Harjadi, Dosen Fakultas Hukum

Universitas Trisakti (Jakarta: Universitas Tarumanagara, 21 September 2023)